

MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI ERA DIGITAL

(Studi Deskriptif Kualitatif pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

Aji Wisn Karma

17107030044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI ERA DIGITAL**

(Studi Deskriptif Kualitatif pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

Aji Wisa Karma

17107030044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aji Wisa Karma
Nomor Induk : 17107030044
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : *Public Relations*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Aji Wisa Karma
Aji Wisa Karma

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING FM-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Wisu Karma
NIM : 17107030044
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul :

MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL (Studi Deskriptif Kualitatif pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2023
Pembimbing

Dr. Yani Tri Wijayanti, S.Sos., M. Si.
NIP : 19800326 200801 2 010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1319/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : Manajemen Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AJI WISA KARMA
Nomor Induk Mahasiswa : 17107030044
Telah diujikan pada : Rabu, 15 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Yani Tri Wijayanti, S.Sos, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6579a85d53c47



Penguji I

Dr. Diah Ajeng Purwani, S.Sos, M.Si
SIGNED

Valid ID: 657682e77c286



Penguji II

Tariq Yazid, S.I.Kom., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6573b43c767a3



Yogyakarta, 15 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 657d7274a05a3

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself ~ Rumi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Prodi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Manajemen Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital (Studi Deskriptif Kualitatif pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah)”. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rama Kertamukti, S.Sos, M.Sn sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

4. Ibu Dr. Diah Ajeng Purwani, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi sekaligus dosen penguji satu skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Dr. Yani Tri Wijayanti, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran disela kesibukannya, demi membantu penulis agar penulis dapat menghasilkan skripsi dengan baik. Sekali lagi terimakasih banyak Ibu Yani yang selalu memotivasi dan membangkitkan semangat penulis, semoga segala apa yang Ibu berikan, menjadi amal dan ibadah yang tidak pernah putus.
6. Bapak Tariq Yazid, M.A. selaku penguji dua yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan skripsi saya.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
8. Keluarga saya khususnya kedua orang tua beserta kakak dan adik peneliti yang selalu mendo'akan dan mendukung segala keputusan peneliti dengan penuh perhatian. Terimakasih atas segala kepercayaan yang telah diserahkan sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya dengan baik.
9. Segenap keluarga besar Safinatul Huda Karimunjawa beserta guru ngaji yang telah banyak memberikan bekal ilmu untuk pengembangan dan pendewasaan dalam kehidupan peneliti.
10. Keluarga besar Ibu Rusmini yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun non materil selama peneliti menempu studinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017 yang turut mewarnai cerita peneliti selama perkuliahan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan bermanfaat.
12. Segenap teman seperjuangan organisasi peneliti yang telah memberikan berbagai pengalaman dan cerita kehidupan peneliti diluar dunia perkuliahan.
13. Sahabat saya Fatwa Jaka yang sering memberikan motivasi dan sering mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan studi. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih juga pada sahabat Wahyu Nugroho yang sering saya repotkan.
14. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terimakasih kepada teman kontrakan hore yang selalu mendukung peneliti selama di Yogyakarta.

Adanya penelitian ini tak luput dari kekurangan. Sumbangan saran dan kritik selalu penulis tunggu, untuk perbaikan penelitian ini. Penulis berharap agar nantinya penelitian ini dapat memberi maslahat kepad khalayak umum khususnya peneliti di masa mendatang.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Aji Wisa Karma

ABSTRACT

Openness or transparency of information from stakeholders or the government is one of the principles or pillars of a country that adheres to democratic understanding. The Indonesian state, one of the adherents of democracy, should now have implemented public information disclosure in this digital era. The Indonesian government has actually been committed to realizing public information disclosure, namely with the establishment of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (KIP), passed by the House of Representatives (DPR) on April 3, 2008. However, in practice, the KIP Law has not been properly implemented by stakeholders and well digested by the community. Some government agencies still seem closed, convoluted, and slow in providing information to the public. Therefore, Law No. 14 of 2008 concerning public information disclosure mandates the establishment of an information commission, including the information commission at the provincial and district levels. This study aims to find out and analyze the communication management of the Central Java Provincial Government in the implementing of public information disclosure policies in the digital era. This research uses qualitative methods with a descriptive analysis approach with analytical techniques using interactive models from Miles and Huberman. The result of this research is that Diskominfo of Central Java Province implements a public openness policy by making plans, taking action, and communicating, which are carried out in an integrated manner to produce optimal results. This public openness policy continues to be pursued smoothly by following the rules of the center. This also has a positive impact on transparency, participation, and accountability.

Keywords: communication, digital era, e-government, public information disclosure.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI..	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Landasan Teori.....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	29
H. Metodologi Penelitian	30
BAB II	39
GAMBARAN UMUM	39
A. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	39
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.....	40
C. Struktur Organisasi	43
D. Profil Sekretariat dan Bidang	45
E. Jumlah Pegawai Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	53
BAB III.....	55
PEMBAHASAN	55

A. Implementasi Manajemen Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital.....	56
B. Implementasi Kebijakan Terhadap Keterbukaan Informasi Publik.....	73
C. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menerapkan Prinsip Mudah, Murah dan Cepat Dalam Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital	93
BAB 4.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
Daftar Pustaka.....	103
LAMPIRAN-LAMPIIRAN.....	106



DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Permohonan Sengketa Informasi Publik	6
Tabel 2. Telaah Pustaka	14
Tabel 3. Jumlah Pegawai Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Juni 2022	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Monev KIP 2022.....	3
Gambar 2. Kerangka Berpikir	29
Gambar 3. Tangkap Layar Visi dan Misi Diskominfo Jawa Tengah	40
Gambar 4. Struktur Organisasi.....	44
Gambar 5. Profil PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Bulan Juni 2022.....	54
Gambar 6. Tangkap Layar Website Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	61
Gambar 7. Tangkap Layar Postingan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah di Sosial Media.....	63
Gambar 8. Tangkap Layar Prioritas Rencana Pembangunan.....	66
Gambar 9. Tangkap Layar Tampilan Halaman Utama Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	72
Gambar 10. Tangkap Layar Akun Twitter Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	74
Gambar 11. Tangkap Layar Akun Instagram Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	75
Gambar 12. Tangkap Layar Profil dan Tugas Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	80
Gambar 13. Tangkap Layar Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	82
Gambar 14. Tangkap Layar Rincian Progam Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	86
Gambar 15. Tangkap Layar Progam dan Kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	88
Gambar 16. Tangkap Layar Informasi SKPD Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	90
Gambar 17. Tangkap Layar Tugas dan Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbukaan maupun transparansi pada informasi dalam pemangku kepentingan ataupun pemerintah adalah salah satu dasar atau pilar dalam negara yang mengikuti paham demokrasi. Dalam penerapan sistem Indonesia telah menganut sistem demokrasi yang sepatutnya telah memberlakukan keterbukaan informasi pada masa digital ini. Yaitu zaman yang mana warga Indonesia bukan lagi terdapat sekat pembeda (*borderless*) dalam hak publik untuk mendapatkan informasi. Dengan terwujudnya transparansi informasi kepada publik oleh pemerintah bisa memberikan respon baik dalam terbentuknya kontrol sosial. Hak atas informasi adalah kebutuhan fundamental yang penting dan dirumuskan oleh para Deklarator Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946, memandang bahwa hak tersebut merupakan asas guna pondasi guna mendapatkan kewenangan yang lainnya. Hak berguna untuk dijadikan landasan utama pemerintah yang terbuka serta partisipatoris.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah memiliki komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 atas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 3 April 2008. UU KIP bisa menjadi sarana masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

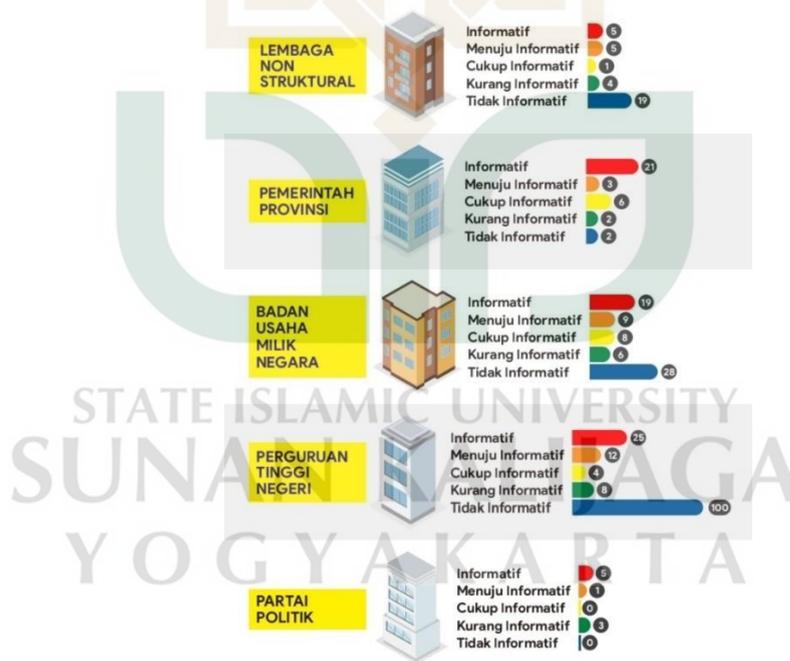
serta bernegara. Pada bagian tersebut masyarakat bisa berperan aktif dalam memonitoring dan mengevaluasi rumusan rencana pemerintah yang belum ataupun sudah dikerjakan. Kebebasan informasi bisa dijadikan dorongan semangat demokratisasi dalam memberikan keterbukaan serta tanggung jawab yang terarah. Strategi tersebut diharapkan untuk memudahkan akses publik dalam mendapatkan informasi publik secara maksimal. Selanjutnya, komitmen tersebut bisa mewujudkan *governability* yang mana negara bisa menjalankan secara efektif serta efisien tanpa menyisihkan dasar demokrasi.

Namun dalam implementasinya, UU KIP tersebut belum dilaksanakan dengan semestinya oleh para pemangku kepentingan, serta belum bisa dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Masih terdapat lembaga pemerintah yang masih tertutup, bertele-tele serta lamban dalam membuka informasi bagi masyarakat. Seharusnya dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Menempuh lebih sepuluh tahun dilangsungkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik masih menghadapi situasi yang memiliki fakta bahwa sejumlah badan publik belum sepenuhnya mematuhi ketentuannya. Pada Tahun 2020 terpantau keterbatasan pematuhan Badan Publik terhadap penerapan pengungkapan informasi kepada masyarakat yang didapat dari hasil observasi serta penilaian oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Total terdapat 348 Badan Publik yang tersebar, Dalam peninjauan Badan Publik terkait keterbukaan pada tahun 2020, sekitar 72,99 persen (254 Badan Publik) masih belum sepenuhnya mematuhi

persyaratan untuk mengungkapkan informasi publik, sementara 17,53 persen (61 Badan Publik) berada dalam kategori cukup informatif, 13,53 persen (47 Badan Publik) kurang informatif, dan 41,95 persen (146 Badan Publik) tidak informatif. (kominfo.jatimprov.go.id, 2020). Dan dua tahun berikutnya yakni pada tahun 2022 Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi lagi terhadap keterbukaan informasi badan publik masih ditemukan badan publik yang kurang informatif bahkan tidak informatif. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan komisi informasi pusat dapat dilihat di gambar bawah ini.

Gambar 1

Hasil Monev KIP 2022



Sumber: Website Komisi Informasi Pusat RI

Rendahnya penerapan dalam mengimplementasikan UU KIP sungguh tidak lepas oleh manajemen komunikasi pemerintah yang belum optimal untuk memfokuskan terbukanya informasi kepada publik. Bagian yang lainnya mengakibatkan diskusi strategi pemerintah belum efisien tidak lepas dalam turunnya keyakinan masyarakat bagi penyelenggara negara. Berdasarkan J.A Heise (1985) dalam (Marroli J. Indarto, 2012) menjelaskan turunnya keyakinan untuk pemerintah adalah pengaruh dalam komunikasi yang belum baik antara pemerintah dengan masyarakat . Dimana masyarakat sadar bahwasanya lembaga pemerintah belum mengaplikasikan aturan pemerintahan sejalan dengan struktur politik demokrasi pada terbukanya informasi. Terdapat masyarakat mendapati kesulitan untuk memperoleh informasi yang tepat tentang kegiatan pemerintah. Untuk kedudukan yang lebih spesifik, budaya transparan oleh pemerintah kurang serta keikutsertaan masyarakat untuk menyusun kebijakan kurang. Padahal seharusnya pemerintah berkewajiban menyampaikan amanah, atau dalam konteks permasalahan ini pemerintah berkewajiban menyampaikan segala informasi yang menjadi hak publik untuk diketahui. Sebagaimana firman Allah dalam Al_Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

حُكِّمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya*

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Kemenag RI, 2012).

Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan supaya segala pesan tersebut di berikan untuk yang berhak mendapatkannya. Pesan dan tuntutan seorang hamba hak interaksi antar makhluk sosial dan kewajiban seorang hamba melaksanakan porsinya dalam kegiatan spirituil, seperti shalat, nazar, puasa, kifarlat. Amanat tersebut bertujuan agar hak makhluk tuhan berkaitan satu dengan lainnya (RI, 2012). Larangan dalam kewajiban interaksi tersebut adalah menghindari *abuse* penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Dalam konteks hal ini pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah untuk menjadi sebagian bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Brad L. Rawlins (2009) dalam (Marroli J. Indarto, 2012), di dalam komunikasi lembaga modern, pemegang keperluan memohon lembaga bisa terbuka dalam pemberian informasi, jujur serta akurat, serta tidak hanya mengekspresikan akan tetapi tanggung jawab untuk mendapatkannya. Dia menjelaskan dalam keterbukaan yang diperlukan keyakinan yang menghasilkan sinergi simbiolisis timbal balik dan keautentikan sumber informasi. Menurut Bunting (2004) di dalam (Marroli J. Indarto, 2012), keterbukaan menjalankan peran penting untuk kemampuan badan dalam mendapatkan serta menegakkan kepercayaan publik. Ia menekankan untuk memperoleh serta menggenggam kepercayaan, pemerintah wajib adanya keterbukaan akses untuk berkesempatannya pengawasan bagi masyarakat. Selain terbukanya untuk membagi informasi, terbukanya juga

memerlukan lembaga yang bisa memahami serta memberikan respon kepada masyarakat.

Maka dari itu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi di daerah provinsi maupun kabupaten. Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Komisi Informasi resmi berdiri pada tanggal 13 Mei 2011 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 atas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Komisi Informasi dibuat menjadi lembaga mandiri difungsikan untuk melakukan UU KIP serta peraturan penerapannya, mengarahkan standarisasi dalam melayani masyarakat terkait kebuthunan informasi, dan konsultasi konflik masyarakat umum lewat perantara maupun proses *adjudication*. Sejak tahun pembentukannya hingga tahun 2019 jumlah sengketa atau pertikaian informasi publik yang diurus Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terus bertambah, tercatat sebanyak 107 permohonan yang masuk. Pada tahun 2017 ada 23 permohonan sengketa informasi publik, di tahun 2018 ada 37 permohonan sengketa informasi publik, pada tahun 2019 ada 47 permohonan sengketa informasi publik, pada tahun 2020 terdapat 118 permohonan sengketa informasi publik, dan pada tahun 2021 terdapat 155 permohonan sengketa informasi publik (Kipjateng.jatengprov.go.id, 2019).

Tabel I
Jumlah Permohonan Sengketa Informasi Publik

NO	Jumlah Permohonan Sengketa Informasi Publik	Tahun
1.	23 Permohonan	2017
2.	37 Permohonan	2018

3.	47 Permohonan	2019
4.	118 Permohonan	2020
5	155 Permohonan	2021

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan data dari KIP Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah kategori berita terbuka. Sebagian besar konflik terjadi karena tidak ditanggapinya permohonan informasi, tidak disediakanya informasi berkala, permohonan pemberitahuan tidak ditanggapi serupa dengan apa yang diminta, dan penolakan permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian (uji konsekuensi oleh pihak Termohon selaku Badan Publik atas perintah Majelis Komisioner pemeriksa sengketa sesuai ketentuan Perki 1 Tahun 2017 atas Pengklasifikasian Informasi Publik) (Kipjateng.jatengprov.go.id, 2018).

Namun hal itu juga diimbangi dengan prestasi yang mencengangkan yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari tahun 2018 hingga 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan menjadi provinsi paling informatif se-Indonesia untuk keterbukaan informasi publik atas peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Secara konstitusional berfungsi dari Diskominfo membantu gubernur dalam pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, pengaplikasian pemantauan, penilaian serta melaporkan gejala konflik dan informasi masyarakat umum, domain instutisi pelaksana, pemberdayaan *e-Government*, dan persandian pemantauan statistik sektoral, dan ketetapan instrumen kerjasama dan kodefikiasi antar wilayah. Hal ini menunjukkan Diskominfo Jawa Tengah memiliki tanggungjawab dan peran yang strategis dalam

menyusun, mengatur dan mengevaluasi manajemen komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengerjakan keterbukaan ataupun terbukanya informasi publik.

Untuk itu, Diskominfo Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengedarkan kebijakan transparansi informasi kepada publik dan pemangku kepentingan di bawahnya dengan tujuan mendukung terbukanya informasi publik. Manajemen komunikasi pemerintah memiliki peran krusial dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. Diperlukan manajemen komunikasi pemerintah yang terkoordinasi, terarah, dan terstruktur, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas proses sosialisasi kebijakan kepada dua kelompok, yakni internal (entitas pemerintahan) dan eksternal (masyarakat umum). Bagian internal bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran sosial akan jaminan dan perlindungan akses informasi publik yang mudah. Hal ini penting dan dijamin oleh UU KIP serta menegaskan komitmen pada akuntabilitas pemerintahan. Di sisi lain, bagian eksternal bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami hak konstitusional mereka untuk memperoleh informasi, sekaligus berperan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada dasarnya kominakator pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dapat ditemukan di berbagai tingkatan lembaga pemerintahan, baik dalam lembaga pemerintahan provinsi itu sendiri maupun dalam pemerintahan tingkat kabupaten.

Dari hasil pemaparan diatas menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji metode manajemen komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menatik kesadaran masyarakat gunas aktif dan paham maanfaat informasi publik. Prestasi

yang sudah didapat sebagai provinsi paling informatif se-Indonesia apakah menunjukkan korelasi yang positif dengan metode manajemen komunikasi pemerintah yang sudah dijalankan atau tidak. Buktinya juga beberapa kasus mengenai permohonan informasi dari tahun 2017 hingga tahun 2019 meningkat. Hal ini mengindikasikan keterbukaan informasi publik masih perlu dimasifkan dan adanya perbaikan, koreksi, serta evaluasi untuk manajemen komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan problematika penelitian yang ada, maka rumusan masalah pada kajian ini yaitu bagaimana manajemen komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di era digital?

C. Tujuan

Berlandaskan masalah yang dirumuskan, kajian ilmiah ini bertujuan untuk memahami serta menganalisa manajemen komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di era digital.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap Kajian ilmiah ini dapat menjadi rujukan dan objek perbandingan dalam meningkatkan ilmu komunikasi, mampu membuka wawasan dan keberagaman baru mengenai kajian ilmu komunikasi pada umumnya. Khususnya dalam kajian manajemen komunikasi pemerintah dalam penerapan keterbukaan informasi publik

b. Agar penelitian ilmiah dapat digunakan sebagai sumber bandingan khususnya pada kajian manajemen komunikasi pemerintah dan dapat memberi manfaat data bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap kajian ilmiah ini mampu menjadi atribut acuan, pelengkap dan sebagai masukan Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola manajemen komunikasi pemerintah yang efektif untuk menjalankan program penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di era digital.

3. Manfaat Sosial

Kajian ilmiah ini diharapkan dapat nuansa keilmuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam lembaga pemerintahan sehingga masyarakat sadar akan perannya untuk ikut mengawasi dan mengontrol program-program pemerintahan yang dijalankan. Sehingga nantinya bisa melahirkan pemerintahan yang bersih, transparan atau *good governance*.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian, peneliti harus berdasarkan pada deskripsi yang ada, dan dalam hal ini, penggunaan telaah pustaka menjadi hal yang penting. Telaah pustaka digunakan untuk memahami secara sistematis pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti lain, sehingga dapat menjadi pembanding atau referensi bagi peneliti dalam penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa telaah pustaka yang menjadi rujukan peneliti antara lain:

1. Salah satu rujukan utama dalam analisis ini adalah sebuah jurnal riset berjudul "*Manajemen Komunikasi dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban*". Penelitian ini ditulis oleh Nibrosu Rohid dan Redi Panuju yang berfokus pada transparansi dan manajemen informasi publik di PPID Kabupaten Tuban, mencakup aspek-aspek seperti proses pengelolaan, tugas, fungsi, dan hambatan yang terjadi selama implementasi. Dalam pendekatan penulis sebelumnya menggunakan deskriptif kualitatif dalam penelitian dengan melakukan evaluasi komunikasi internal di PPID Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya manajemen komunikasi telah dilakukan di PPID Kabupaten Tuban, penerapannya masih belum optimal dan menghadapi tantangan internal dan eksternal. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi tentang eksistensi PPID, juga kinerja yang kurang optimal dari PPID pembantu akibat minimnya pedoman bersama dengan PPID Tuban. Situasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak untuk memperoleh informasi karena ketidaktahuan mengenai keberadaan PPID Tuban, menghambat kemajuan dalam mendorong transparansi informasi publik di Kabupaten Tuban.

Perbedaan mendasar antara tulisan ilmiah ini dan kajian ilmiah sebelumnya yang dilakukan oleh Nibrosu Rohid dan Redi Panuju adalah pada subjek penelitian. Peneliti ini fokus pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, sedangkan karya sebelumnya berfokus kepada Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban.

Termaktub persamaan antara penelitian ini dan ksji sebelumnya, yaitu keduanya memiliki fokus pada manajemen komunikasi dalam mendorong keterbukaan layanan infosmasi di ruang publik pada institusi pemerintahan. Selain itu, keduanya juga menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian (Rohid & Panuju, 2017).

2. Penelitian lain yang menjadi sumber referensi adalah jurnal riset yang disusun oleh Sintar Nababan dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Penelitian ini berjudul "Strategi Bantuan Informasi untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik". Dalam jurnal ini, disajikan pembahasan tentang langkah-langkah strategis yang diambil oleh lembaga penyiaran untuk memperkuat transparansi informasi publik dan partisipasi masyarakat. Contohnya, TVRI Padang sebagai penyiaran publik telah menunjukkan independensi, netralitas, dan ketidakkomersialan dalam penetapan kebijakan siaran. Meskipun sudah mengikuti Undang-Undang No. 14 tahun 2008 dan memberikan bantuan informasi secara terbuka, TVRI Padang belum sepenuhnya menerapkan aplikasi yang dianjurkan oleh Komisi Informasi Pusat. Namun, survei yang dilakukan oleh KIP menemukan bahwa baik pusat maupun daerah, TVRI masih kurang informatif jika dibandingkan dengan lembaga publik lainnya. Dalam kajian ilmiah sebelumnya yang dilakukan oleh Sintar Nababan berbeda dalam pemilihan objek penelitian. Penelitian ini akan fokus pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Sintar Nababan berfokus pada Lembaga Penyiaran TVRI Padang. Selain itu, fokus penelitian ini akan lebih berorientasi pada bagaimana manajemen dapat mendorong keterbukaan

informasi publik, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan strategi bantuan informasi publik (Nababan, 2019).

3. Referensi ketiga adalah sebuah jurnal riset yang berjudul "Manajemen Komunikasi INFID dalam Pendampingan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta Mencapai Sustainable Development Goals". Jurnal ilmiah yang ditulis Salsabila Pratiwi dan Yuyu Sriwartini ini berfokus pada manajemen komunikasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang mendukung wilayah Yogyakarta dan Cirebon dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Studi ini mengidentifikasi aspek perencanaan, organisasi, pergerakan, dan pengendalian dalam konteks komunikasi sebagai pendampingan INFID terhadap pemerintah daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih dalam kajian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah yang INFID berperan mengkoordinasikan partisipasi berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) melalui strategi komunikasi yang tepat. Kajian Ilmiah yang ditulis oleh Salsabila Pratiwi dan Yuyu Sriwartini berbeda pada objek penelitian yang sedang penulis teliti. Objek kajian sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Cirebon dan Yogyakarta, sedangkan objek penelitian penulis saat ini adalah Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Faktor pembeda selanjutnya yaitu, Jika penelitian sebelumnya fokus pada peran dan fungsi manajemen komunikasi dalam melakukan

pendampingan pemerintah daerah, peneliti memilih fokus pada bagaimana manajemen untuk mendorong keterbukaan informasi publik (Sriwartini, 2020)

Tabel 2
Telaah Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul/Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Nibrosu Rohid dan Redi Panuju	Manajemen Komunikasi dalam Bantuan Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban. Jurnal LISKI Vol 3, Nomor 2, Tahun 2017.	PPID Kabupaten Tuban sudah melaksanakan manajemen komunikasi, namun dalam penerapannya masih kurang maksimal dan ada beberapa kendala dari internal maupun eksternal. Diantara kendala-kendalanya adalah kurang maksimalnya sosialisasi keberadaan PPID dan kurang intensifnya kinerja dari PPID pembantu yang disebabkan karena minimnya prosedur dengan PPID Tuban	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada subjek penelitian. • Fokus penelitian terdahulu terletak pada proses pengelolaan yang ada pada PPID kabupaten Tuban, sedangkan yang akan dilakukan peneliti fokus pada seluruh proses manajemen komunikasi yang dilakukan DISKOMINFO Provinsi Jawa Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. • Sama-sama membahas keterbukaan informasi publik.
2	Sintar Nababan	Strategi Bantuan Informasi untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi,	Lembaga penyiaran Publik TVRI Padang sudah memberikan bantuan publik secara terbuka, meskipun belum menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek Penelitian. • Penelitian terdahulu fokus pada strategi bantuan informasi publik, sedangkan fokus peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. • Sama-sama membahas keterbukaan

		vol. 17, Nomor 2, Tahun 2019.	Komisi Informasi Pusat (KIP).	sekarang pada kebijakan transparansi informasi publik.	informasi publik.
3	Salsabila Pratiwi dan Yuyu Sriwartini	Manajemen Komunikasi INFID dalam Pendampingan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta Mencapai <i>Sustainable Development Goals</i> . Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5, Nomor 9, Tahun 2020.	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan serta pengendalian dari sudut pandang komunikasi sebagai sarana dan upaya pendampingan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan Yogyakarta yang dilakukan oleh INFID. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa manajemen komunikasi yang dilakukan oleh INFID melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dengan sistem kerja SDGs.	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek Penelitian. • Fokus penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran dalam mencapai Sustainable Development Goals, sedangkan Penelitian sekarang fokus pada kebijakan transparansi informasi publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. • Sama-sama menggunakan sudut pandang manajemen komunikasi.

Sumber: Olahan Peneliti.

F. Landasan Teori

1. Manajemen Komunikasi

Manajemen memiliki peran penting guna berjalannya kegiatan komunikasi guna merealisasikan target komunikasi. Dasar-dasar manajemen serta kegiatan komunikasi wajib disandingkan serta disesuaikan dengan asas tujuan yang ingin dicapai (Riinawawti, 2021). Menurut Kaye (1995) dalam (Abidin Yusuf Zainal, 2016), istilah manajemen komunikasi merujuk pada model orang-orang mengelola metode komunikasi didalam hubungannya dengan individu lain didalam berbagai setting atau konteks komunikasi. Dalam konteks ini, manajemen komunikasi dapat berperan sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja badan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama dari manajemen komunikasi ialah mengoptimalkan sumber daya manusia serta teknologi untuk menciptakan dialog antar badan melalui lembaga maupun badan dengan publik. Sebagaimana yang diungkapkan (Ridwan, 2018), tujuan utama dari manajemen komunikasi ialah menciptakan dialog dua arah serta memfasilitasi pertukaran informasi yang relative sama sebagai hasil dari proses komunikasi. Komunikasi merupakan elemen integral untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen, dan sebaliknya, manajemen berfungsi seagai input dan output dalam proses komunikasi.

Dalam kegiatan sebuah lembaga, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, penting untuk terdapat dialog. Oleh karena itu, manajemen komunikasi yang optimal sangat diperlukan dalam

menyediakan informasi dengan baik supaya tersampaikan kepada masyarakat serta mudah dipahami. Ada empat langkah operasional mengacu pada pendekatan Cutlip, Center, dan Broom's (2009) dalam (Abidin Yusuf Zainal, 2016) adalah sebagai berikut:

a. Mendefinisikan Masalah

Sebelum membuat perencanaan dalam membuat kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah dan riset. Menjelaskan masalah mencakup pendahuluan permasalahan, pengidentifikasian kebutuhan masyarakat, melakukan penelitian, dan mengawasi opini.

Selanjutnya hal yang dilakukan para implementor kebijakan publik setelah mampu mendefinisikan masalah dengan baik, hal penting yang dilakukan adalah riset. Riset ini memiliki peran penting dalam memperoleh hasil rumusan yang akurat. Seorang Pengamat komunikasi tidak akan memahami suatu masalah dan solusi penyelesaian, tanpa adanya penelitian. Penelitian tidak selalu dapat memberikan jawaban lengkap dalam suatu fenomena namun, mampu menjadi alat ukur dan dasar untuk merumuskan sistem komunikasi interaktif karena mampu menghindari keambiguan informasi.

b. Membuat Perencanaan

Dalam proses penyusunan dan perencanaan implementasi kebijakan, penting bagi para pelaksana untuk mampu berfikir kritis maupun strategis. Berpikir kritis maupun strategis ini bertujuan untuk

menentukan tujuan jangka panjang yang mendasari tindakan, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan tersebut. Rumusan ini mencakup alur yang standar dalam penentuan dan penyusunan rencana, juga gambaran tentang fenomena yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan rencana tersebut, diikuti dengan langkah-langkah untuk meningkatkan rencana tersebut. Perencanaan komunikasi mencakup penetapan manfaat komunikasi, analisis khalayak umum, penyusunan taktik, pengembangan strategi dan taktik, jadwal, dan biaya. Keuntungan dari penyusunan strategi ini adalah mendukung manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memfasilitasi kerjasama dengan pihak yang terlibat, dan merumuskan tujuan yang lebih rinci untuk mengembangkan sebuah lembaga atau perusahaan.

c. Aksi dan Komunikasi

Pelaksanaan aksi dan komunikasi melibatkan implementasi kegiatan maupun strategi komunikasi yang dirancang untuk sampai pada keinginan yang spesifik. Kesesuaian, prioritas, serta pengukuran hasil yang sesuai dengan jenis kegiatan menjadi faktor utama yang dapat menunjukkan tingkat kesuksesan dalam penerapan strategi tersebut. Beberapa bagian penting yang terdapat dalam konsep aksi serta komunikasi, diantaranya adalah kegiatan nyata, komunikasi, serta identifikasi faktor menjadi halangan maupun dukungan. Dalam implementasi praktik, bagian penting yang dilakukan adalah merumuskan langkah-langkah

taktis dan rinci berlandaskan kerja ilmiah SWOT, diantaranya melibatkan pertimbangan mengenai target durasi pengerjaan. Sedangkan interaksi tuturan bertujuan ialah menjadi keselarasan arti serta bisa mengurangi bias. Selanjutnya analisis sebab sebab lain guna menjadi gangguan maupun bantuan, hal ini berkaitan dengan gangguan serta dukungan dalam mengaplikasi manajemen komunikasi pemerintahan. Faktor-faktor itu bisa diangkat *benchmarking* dalam penanganan komunikasi kebijakan pada masa mendatang.

d. Evaluasi Bentuk Aktivitas Komunikasi

Evaluasi yang dilaksanakan wajib diamati dalam memastikan level efektivitas penyusunan, penerapan, serta dampak terhadap lembaga . Penilaian dilakukan berfungsi untuk memperoleh masukan serta mengukur keefektivan program yang telah dijalankan. Kegiatan penilaian yang dikerjakan di dalam komunikasi, diantaranya pengakuan nilai asli (*judgemental assessment*), hasil komunikasi (*communication output*), penilaian fase kesehatan, penilaian fase penerimaan, dan penilaian jumlah peserta.

2. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintah adalah proses pertukaran informasi dan pesan antara individu-individu dalam lingkungan lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu komunikasi pemerintahan tidak terlepas dalam konteks komunikasi pemerintah. Layaknya komunikasi secara umumnya, komunikasi lembaga juga mengindikasikan metode pengiriman pesan serta penerimaannya antar

satu individu dengan individu lainnya melewati proses serta saluran khusus, bertujuan setara dengan pesan yang dikirimkan. Menurut Robin (1989) dalam (Abidin Yusuf Zainal, 2016) Komunikasi pemerintahan adalah mekanisme untuk menyampaikan aspirasi publik ke dalam aturan sosial masyarakat dan juga sebagai media guna mempengaruhi transformasi, memodifikasi perilaku, meningkatkan produktivitas informasi, serta sebagai alat yang berfungsi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Selain itu, komunikasi pemerintahan juga membantu dalam melaksanakan serta menyesuaikan fungsi-fungsi manajemen.

Melewati komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berkomunikasi dengan partisipan yang lain yang disebut komunikan, dan mereka bertuker informasi, gagasan, perasaan, dan sikap. Bentuk Komunikasi ini terjadi antara aparatur pemerintah dalam instansi lembaga, pelaku usaha, publik sosial, dan lembaga bukan pemerintah di luar instansi lembaga. Selain berfungsi sebagai mekanisme pemerintah dalam menyajikan dan menerima informasi publik, komunikasi pemerintahan memiliki fungsi lain yaitu sebagai media koordinasi aktivitas yang terorganisir guna mencapai kerjasama yang efektif (Abidin Yusuf Zainal, 2016).

Bagaimanapun komunikasi pemerintah tidak akan mampu melakukan tugasnya, mengaktifkan penggunaan sumber-sumbernya, serta kesimpulannya yang tidak sampai kepada tujuannya setara dengan harapan. Oleh sebab itu komunikasi pemerintah seperti fungsi penting didalam lembaga pemerintah baik guna *managing staff* dan *managing people*.

Komunikasi pemerintah *managing staff* adalah interaksi antar anggota lembaga serta memiliki tujuan supaya pegawai maupun staf menyadari serta mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan serta supaya eksekutif pemerintah memperoleh data yang disampaikan anggota lembaga yang semua komponennya yang bermanfaat guna mewujudkan lembaga pemerintah yang efisien dan efektif. Komunikasi pemerintah dalam manajemen sumber daya manusia (*managing people*) adalah komunikasi eksternal lembaga yang bertujuan untuk menjelaskan informasi yang berkaitan dengan sistem aturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, badan-badan non-pemerintah, Pelaku usaha dan komunitas organisasi masyarakat. Selain itu, melalui komunikasi ini, pemerintah juga mendapatkan informasi dari mereka guna mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan, serta untuk mengontrol hasil yang ditimbulkan. Hal ini dikerjakan guna mengambil keputusan guna mengevaluasi keberlangsungan kebijakan serta peraturan tersebut perlu dilanjutkan, dihentikan, direvisi, atau dimodifikasi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dalam tahap proses kebijakan publik yang memiliki strategis tinggi. Secara prinsip, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Kebijakan yang baik harus diimplementasikan dengan efektif agar dapat berfungsi dengan tepat dan sesuai sasaran yang dituju. Berdasarkan Gordon dalam (Mulyadi, 2018)

implementasi kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan program-program yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, administrator bertanggung jawab atas berbagai tindakan yang beragam, seperti melatih aktivitas penyusunan, pengimplementasian, dan menetapkan aturan yang diambil. Dalam pelaksanaan wewenang, ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari Edward dalam (Mulyadi, 2018) menjelaskan bahwa keempat faktor itu berperan penting dalam memastikan keberhasilan didalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik.

Faktor yang *pertama* adalah komunikasi. Yang dimaksudkan komunikasi dalam hal ini ialah tersampainya pesan oleh pemberi pesan (pembuat kebijakan) untuk penerima pesan (implementor kebijakan) melewati saluran serta tujuan tertentu. Pembuat kebijakan perlu mengkomunikasikan kebijakan mereka secara jelas, akurat, dan konsisten kepada pelaku kegiatan (implementor) agar para pelaksana mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan yang dipilih. Dengan mengerjakan komunikasi yang efektif, bagian ini untuk bertujuan tidak ada kesalahpahaman maupun reinterpetasi yang salah yang dikerjakan implementor. Dalam metode komunikasi ada tiga hal yang meliputi, yaitu transmisi, konsistensi, serta kejelasan (Kasmad, 2013).

Transmisi memiliki kaitan dengan penyajian informasi diantara implementor yang melibatkan pemahaman pelaksana akan berbeda dengan keputusan yang dirancang berdasarkan aturan penerapan sehingga

terhindar dari kesalahpahaman dalam pelaksanaan keputusan. Konsistensi kegamblangan memiliki ketertarikan mengenai kejelasan informasi pelaksana ataupun kejelasan pesan komunikasi yang diserahkan. Kejelasan berarti bahwa perintah yang didapat oleh pelaksana tidak boleh menghasilkan kontra yang menyebabkan perselisihan.

Faktor yang kedua *kedua* adalah sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika sumber-sumber daya pendukung penerapan kebijakan kurang terpenuhi (Mulyadi, 2018) . Sumber daya ini meliputi kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, otoritas, serta fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia memainkan bagian penting didalam penerapan kebijakan. Dalam mewujudkan implementasi rancangan yang efektif perlu adanya jumlah staf yang memadai dan memiliki kompetensi untuk menjalankan suatu kebijakan yang efektif. Sumberdaya selanjutnya yang istimewa didalam sebuah penerapan kebijakan ialah otoritas. Otoritas memiliki kaitan dengan besarnya jangkuan tugas yang bisa dikerjakan oleh pejabat pembentuk kebijakan ataupun pelaksana. Otoritas tersebut wajib bersifat formal dan tegas karena sebagian otoritas ataupun legitimasi untuk melakukantugas. Sumberdaya selanjutnya yang penting dalam sebuah penerapan kebijakan adalah informasi. Informasi termasuk instrumen penting dalam penerapan sebuah kebijakan. Para pelaksana harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dan kompeten tentang suatu peran dan fungsi yang harus mereka jalani. (Kasmad, 2013).

Faktor yang ketiga adalah disposisi. Sikap atau disposisi dari para pelaksana ialah faktor penting lain dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Para pelaksana tidak hanya diharapkan mempunyai pengetahuan serta pemahaman tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus mempunyai keinginan serta pandangan positif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Bentuk lainnya dari disposisi adalah persepsi, otoritas, pemahaman serta komitmen para pelaksana (implementor) dalam menindaklanjuti suatu aturan. Dalam disposisi, ada dua hal yang penting untuk dipahami. Pertama, pengangkatan birokrat harus melibatkan individu-individ yang berkompotensi, berintegritas, dan loyal terhadap keputusan bersama. Kedua, adanya insentif untuk mendorong pelaksanaan kebijakan dengan efektif. (Kasmad, 2013). Dalam faktanya, manusia cenderung berperilaku sesuai keinginan dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan manipulasi insentif diharapkan anggota dapat bekerja sesuai porsi yang diinginkan dalam suatu kebijakan. Manipulasi insentif ini bisa dikerjakan dengan cara memberikan tambahan keuntungan yang mampu pelaku pelaksana sesuai dengan tuntutan perancang kegiatan. Para pelaksana yang bisa mengelola disposisi dengan baik mempunyai peluang yang lebih luas untuk melakukan tuntutan aturan sesuai dengan keinginan perancang kegiatan..

Selanjutnya faktor yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi menjadi kunci yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi adalah komponen sistem yang beroperasi di lembaga publik atau

pemerintah sesuai fenomena pekerjaan yang berlaku. Sistem ini diatur dalam kekuasaan dan berjenjang, selaras kinerja utama yang telah diatur dalam setiap levelnya. (Awang, 2010). Keberadaan struktur birokrasi yang baik dan terbuka berdampak pada kemudahan pengawasan menjadi lebih rinci berpatokan pada pengembangan prosedur standar pengoperasian (standard operating procedure) atau SOP. Standar kuat yang mengikat dalam menjalankan pekerjaan (SOP), sesuai dengan komunitas yang sedikit mengalami perubahan. SOP akan sulit untuk disesuaikan dengan institusi yang bertujuan mencapai perubahan dalam cara-cara kerja yang biasanya diterapkan.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Asas keterbukaan adalah prinsip yang mengakui peran individu sosial dan komunal untuk menerima informasi yang akurat, benar, dan tidak mengandung kekerasan tentang stabilitas, dengan memperhatikan hak-hak privasi individu, kelompok, dan rahasia institusi negara (Kristyanto, 2016). Informasi publik yang terbuka adalah data yang diperoleh, didokumentasikan, diolah, ditujukan dan diterima oleh otoritas institusi publik yang berhubungan dengan institusi negara berlandaskan undang-undang lainnya. Tambahan informasi yang relevan bagi kemaslahatan sosial. Keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan bermakna sebagai kemampuan untuk menyimpulkan fenomena organisasi di sektor publik melalui diskusi terbuka, izin akses berkas, publikasi data informasi menggunakan website resmi dan

aktif, melindungi pemberi data informasi (*whistleblowers*), serta melalui bocoran informasi secara ilegal (Dwiyanto, 2011).

Di Indonesia, kebutuhan untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam dan luar negara diatur dalam dalam UUD 1945 Pasal 28 F. Pasal tersebut menjelaskan masyarakat umum mampu dan memiliki mencari dan menerima hak-hak komunikasi dan informasi guna meningkatkan kapasitas pribadi dan lingkungan publik. Selain itu, perseorangan masyarakat boleh untuk mempunyai informasi baik untuk diolah dan disampaiakan yang bersumber dari media yang ada. Peraturan konstitusi membolehkan kegiatan pemanfaatan informasi terkait, seperti mencari, menerima, mempunyai, menyimpan, dan memberikan informasi.

a. Jenis-Jenis Informasi Publik

Pemberian informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, terdapat dua klasifikasi informasi publik dalam kerangka

layanan, yakni tersedianya informasi untuk umum dan batasan informasi yang dikecualikan (Abdulhamid Dipopramono, 2017).

Informasi yang terbuka untuk umum dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, melibatkan informasi berkala yang diwajibkan untuk diberikan secara rutin, informasi yang harus diberikan dengan segera, dan informasi yang dapat diakses setiap saat. Aturan ini sudah dijelaskan dalam Pasal dan juga UU KIP. Di sisi lain, informasi yang mendapat pengecualian adalah informasi yang

memiliki sifat rahasia dan memerlukan evaluasi konsekuensi sebelum diungkapkan..

b. Prinsip UU Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Abdullah Maryati pada tahun 2010, prinsip-prinsip teruat dalam Pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki cakupan universal. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Segala informasi umum (publik) yang benar dan autentik dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang merupakan pengguna layanan informasi publik, pengecualian jika dilaksanakan pembatasan yang ditetapkan dari peraturan (Pengecualian Akses Maksimum Terbatas). Akses terhadap informasi yang termasuk dalam kategori pengecualian diatur dengan ketat dan terbatas.
- 2) Proses perolehan informasi harus cepat, tepat waktu, ekonomis, serta melalui prosedur yang sederhana. Cara mengakses informasi yang diminta harus mudah dimengerti dan dijangkau semua kalangan.
- 3) Segala bentuk informasi rahasia harus sejalan dengan undang-undang, etika, serta kemaslahatan masyarakat berdasarkan pada penilaian konsekuensi.

c. Tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik

Dalam penafsiran dari Abdulhamid Dipopramono pada tahun 2017, jika melihat identitas UU KIP secara mendasar, kemudahan dan

keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Butir a, Butir b, dan Butir c bertujuan untuk mengedepankan aspek transparansi partisipasi, dan akuntabilitas adalah :

- 1) Transparansi, Transparansi yang dimaksud dalam poin a adalah memastikan keikutsertaan masyarakat untuk mengetahui susunan aturan wewenang publik, program kebijakan publik, bagaimana suatu keputusan tersebut disepakati dan apa alasan mendasari kesepakatan penetapan kebijakan tersebut, dijamin dan dipenuhi.
- 2) Partisipasi, Partisipasi yang dimaksud pada poin b adalah upaya untuk meningkatkan keterlibatan andil masyarakat dalam rentetan penetapan wewenang publik dan manajemen instansi lembaga masyarakat secara efektif.
- 3) Akuntabilitas, Akuntabilitas yang dimaksud dalam poin c adalah upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik yang ditandai dengan sifat yang akuntabel, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2
Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian diperlukan Cara (metode penelitian) yaitu pendekatan berbasis data yang menampilkan informasi dengan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2021). Kajian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Kajian kualitatif merujuk pada nilai filosofis postpositivisme yang membantu proses investigasi suatu objek alamiah. Instrumen utama dalam penelitian ini, berada ditangan kendali Peneliti yang mengumpulkan data dalam triangulasi (penggabungan) berbagai teknik. Dalam Analisis data, dengan cara induktif/kualitatif, hasil penelitian yang dikaji menunjukkan makna dalam (tersirat) dan bukan menampilkan hasil secara umum (general) (Sugiyono, 2021). Tujuan Penelitian deskriptif yaitu merancang deskripsi yang sistematis, akurat, dan berdasarkan fakta terkait karakteristik dan informasi mengenai pertumbuhan atau objek lainnya. (Hariwijaya, 2015).

Dalam analisis ini penulis memilih pendekatan kualitatif deskriptif guna mendapatkan gambaran detail dan mendalam mengenai proses manajemen komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Metode ini cocok untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung atau baru saja terjadi terkait kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam implementasi manajemen komunikasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mengamati perorangan, komunal (organisme) atau objek yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian. (Idrus, 2009). Subjek penelitian adalah kelompok individu atau pihak yang menjadi bagian inti penelitian. Subjek penelitian berperan andil dalam menghasilkan data sebagai informasi yang relevan untuk penelitian. Analisis ini mengambil subjek penelitian yang berasal dari partisipan dalam kegiatan penyusunan yang bertanggung jawab atas segala proses manajemen komunikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong terlaksananya informasi public yang terbuka. Beberapa dari subjek penelitian ini termasuk Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan Humas Provinsi Jawa Tengah.

b. Objek Penelitian

Adanya Fenomena yang dapat dianalisis dan ditelusuri oleh peneliti dari subjek penelitian dinamakan objek penelitian. Peneliti memfokuskan pada manajemen komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian dalam memberlakukan kebijakan keterbukaan informasi publik di era digital.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data inti yang diperlukan peneliti sebagai modal penelitian. (Sugiyono, 2021) dinamakan data primer. Seorang informan dapat memberikan data primer dari data wawancara atau observasi dari peneliti. Data primer menjadi sumber utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis kajian. Penelitian memanfaatkan hasil wawancara dengan pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang dibutuhkan seorang peneliti sebagai pelengkap suatu penelitian, Data tersebut sudah ada dan dikumpulkan melalui berbagai dokumen atau sumber lainnya. (Sugiyono, 2021). Adapun data sekunder yang peneliti gunakan adalah artikel ilmiah, karangan buku, media massa dan sumber lainnya yang bersal dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder dalam kegiatan penelitain ini. Data Primer peneliti dpatkan dari hasil wawancara secara langsung sedangkan data sekunder sebagai data pendukung penulis dapatkan dari kajian ilmiah yang relevan. Dalam mengumpulkan data, peneliti memanfaatkan strategi pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dapat berhasil berdasarkan kemampuan dan keterampilan pengamat itu sendiri. Pengamat bertanggung jawab untuk melihat atau mendengarkan objek penelitian secara langsung, dan dari pengamatan tersebut ia membuat kesimpulan. Penting untuk mencatat hasil observasi segera setelah dilakukan, agar apa yang diamati tetap segar dalam ingatan pengamat dan bisa diperbaiki pada kesempatan berikutnya. (Yusuf, 2021).

Dalam sudut pandang komunikasi metode pengamatan atau observasi (*observation research*) sering digunakan dalam penelitian untuk mengamati secara langsung dan terstruktur fenomena komunikasi seperti isu sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam praktik metode observasi dibedakan dalam dua tipe, pertama observasi terlibat (*participant observation*), kedua, observasi tidak terlibat (*non-participant observation*). (Pawito, 2007).

b. Wawancara

Metode pengumpulan data lainnya adalah wawancara mendalam yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber yang mampu memberikan data konkrit dan jelas. Dalam prakteknya, pewawancara bertanya secara langsung kepada sumber informasi tentang objek penelitian yang

telah direncanakan sebelumnya. Secara sederhana, wawancara mendalam dapat diartikan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan informan. (Yusuf, 2021). Dalam karya tulis ini, peneliti akan mengerjakan wawancara mendalam dengan pihak terkait langsung yaitu, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan lembaga Komunikasi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data historis, Dokumentasi merupakan metode yang sesuai. Karakteristik utama dari data ini adalah bahwa informasi yang tersedia dengan latar dan zaman yang berbeda tidak menghambat suatu penelitian. Manfaatnya para peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kejadian-kejadian masa lalu. Dokumen dapat berupa catatan atau rekaman mengenai individu atau kelompok, peristiwa, atau fakta sosial yang terjadi dan sesuai dengan kajian penelitian. Suatu data informasi memiliki nilai yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif.

(Yusuf, 2021). Peneliti akan mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, seperti foto-foto, artikel berita online, konten dari website, dan berbagai laporan tertulis lainnya. Dokumen-dokumen ini akan menjadi sumber informasi penting untuk mendukung penelitian dan memahami secara lebih mendalam mengenai isu yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data didapat dari perbincangan kepada informan, hasil dokumentasi tulis di lapangan, serta data pendukung yang dikumpulkan dan disusun akan melalui tahap Analisis data. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori yang relevan, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, memilah data yang penting untuk dikaji lebih dalam dan menyusun suatu kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah bagi para akademisi dan pembaca secara umum. (Sugiyono, 2021). Data yang tersedia akan dianalisis menggunakan pendekatan Milles dan Huberman yang memiliki empat langkah aktivitas, seperti data yang dikumpulkan, data yang direduksi, data yang disajikan, dan penyusunan hasil kesimpulan. Proses pengkajian melibatkan tahap pengumpulan data-data yang relevan. Selanjutnya, data akan diolah dengan cara reduksi, di mana data yang telah dikumpulkan akan diringkas dan diorganisir agar lebih terfokus. Setelah itu, data akan disajikan dengan berbagai cara, seperti tabel, grafik, atau bagan, agar mudah dipahami. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari proses analisis yang dikerjakan dan menguji hasil kesimpulan untuk memastikan keabsahan kesimpulan yang dihasilkan.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam Metode kualitatif pengumpulan data dilaksanakan dengan metode observasi, wawancara lebih lanjut, dan dokumentasi.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah membaca secara umum objek penelitian. Proses ini akan menghasilkan berbagai data umum yang beragam dan bervariasi bagi peneliti terkait dengan fenomena yang sedang dikaji (Sugiyono, 2021).

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses mereduksi data memerlukan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang mendalam. Mereduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan, dan penyaringan elemen-elemen inti, serta fokus pada informasi yang relevan dan signifikan. Data diorganisasi secara sistematis sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat diverifikasi dan dipahami dengan baik. (Sugiyono, 2021). Peneliti akan berpedoman pada teori dalam mereduksi data selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

c. Penyajian Data (Data Display)

Langkah lanjutan yaitu peneliti menyajikan sumber dari seluruh data yang didapat dengan cara menganalisis setara teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Penyajian data merupakan penyusunan data dengan mengintegritaskan kelompok data satu dengan lainnya, menjadikan semua data terlibat dalam analisis (Pawito, 2007). Proses dalam penyajian data memiliki ragam yang berbeda seperti narasi pendek, bagan, relasi antar kategori, flowchart, dan jenis visualisasi lainnya. Miles serta Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa dalam

penyajian data penelitian kualitatif, format yang paling umum dipakai tulisan bernaratif.

d. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verfyng Conclusions*)

Penelitian kualitatif akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan hasil temuan baru berbeda dari kajian terdahulu. Hasil temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau iustrasi yang lebih jelas tentang suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas atau bahkan cacat setelah diteliti. Keseimpulan juga dapat memunculkan nilai interaktif/ teori baru.(Sugiyono, 2021). Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa penarikan dan pengujian kesimpulan bisa diartikan sebagai bentuk Penggambaran secara komprehensif dari objek penelitian berdasarkan penggabungan informasi yang disusun secara cermat dan akurat.

6. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi sumber digunakan penulis dalam memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Triangulasi sumber dapat diartikan sebagai menguji keandalan data dengan memverifikasi data yang bermacam-macam sumber. (Sugiyono, 2021). Triangulasi sumber juga adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa keandalan data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik dalam hasil wawancara dengan informan yang berbeda maupun dengan satu informan yang sama.

Triangulasi sumber data memberikan beberapa manfaat, yaitu: (1) adanya peluang partisipasi memberikan penilaian, (2) memeriksa kesalahan data oleh sumber autentik, (3) memberikan informasi sekunder tanpa paksaan, (4) melibatkan narasumber ketika proses kajian ilmiah, (5) memberikan gambaran awal untuk analisis data, dan (6) memantau kecukupan dan keseluruhan data yang tersedia. (Bungin, 2007). Dalam rangka melakukan triangulasi sumber, peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala KIP Provinsi Jawa Tengah. Kepala KIP memiliki peran penting sebagai kepala lembaga yang mandiri, bertugas melaksanakan UU KIP dan wawancangnya, menetapkan aturan teknis dalam penyediaan layanan informasi publik yang standar, serta memberikan mediasi sebagai solusi penyelesaian perselisihan informasi publik.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian data manajemen komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di era digital dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Manajemen Komunikasi yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dengan cara menerapkan empat langkah manajemen komunikasi dengan efektif. Empat langkah manajemen komunikasi yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu dimulai dengan cara mendefinisikan masalah, selanjutnya membuat perencanaan, aksi dan komunikasi kemudian evaluasi. Faktor pendorong selanjutnya yaitu, terdapat komitmen yang tinggi dari pimpinan, yaitu Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang aktif memangkas pelayanan publik yang berbelit-belit.

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan terus berbenah dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan *e-government*. Berbagai hal yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu dibuatkannya platform media sosial, *website* dan aplikasi digital sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik. Selain itu Provinsi

Jawa Tengah sudah menerapkan *Government Resources Management System (GRMS)* sebagai bukti nyata komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi.

Selain melalui media digital, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sendiri sering melakukan sosialisasi baik itu untuk wilayah kecamatan hingga kabupaten di daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan kepada publik supaya bisa lebih paham lagi terkait UU Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku supaya tidak salah dalam melangkah. Apabila publik sudah paham mengenai UU informasi yang berlaku, diharapkan bisa turut mengawasi pertanggungjawaban Diskominfo Provinsi Jawa Tengah atas kinerja-kinerja yang diserahkan kepada publik.

Selanjutnya Diskominfo Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan (*upskilling & upgrading*) agar mampu memberikan layanan keterbukaan informasi publik yang optimal. Selain itu Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mengadakan suatu program yang disebut dengan monev atau monitoring dan evaluasi, di mana kegiatan ini dilakukan beberapa waktu sekali supaya hasilnya bisa lebih dipercaya dan bisa dijadikan tolak ukur dalam menjalankan program.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai keterbukaan informasi yang ada di Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, adapun saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus dilakukan, mengingat semakin hari perkembangan dunia berubah sangat cepat. Dimana pada zaman ini semua serba digital, sehingga jika tidak ada peningkatan SDM maka lambat laun akan semakin tertinggal dan proses keterbukaan informasi akan sulit didapatkan oleh publik sebagai penerima informasi tersebut. Selain hal tersebut, dengan adanya peningkatan SDM agar dapat melakukan perencanaan dan kesiapan yang lebih maksimal dalam pelaksanaan program-program mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah kedepannya.
2. Meningkatkan internalisasi budaya keterbukaan informasi publik pada lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan mengkampanyekan lebih masif terkait literasi keterbukaan informasi publik.
3. Adanya pengawas yang tugasnya benar-benar mengawasi bagaimana proses penerapan keterbukaan informasi itu terjadi. Memang *monitoring* dan penilaian sudah berjalan dengan baik, akan tetapi hal ini dilakukan setiap beberapa bulan sekali, padahal proses keterbukaan informasi itu harus berjalan setiap hari. Untuk itu, agar pelaku keterbukaan informasi tersebut bekerja dengan benar,

wajib menugaskan seorang pengawas agar tetap berjalan maksimal di tiap harinya.

4. Terus menjaga komitmen dalam prioritas penyelesaian permasalahan informasi publik agar target masyarakat dalam mendapatkan informasi dapat terpenuhi.



Daftar Pustaka

- Abdulhamid Dipopramono. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Renebook.
- Abdullah Maryati. (2010). *Seri Panduan Community Center*. Pattiro.
- Abidin Yusuf Zainal. (2016). *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. CV Pustaka Setia.
- Agus, Suryono. 2001. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Malang.
- Afrinaldi dkk. (2013). *Moctar Naim Merantau Sepanjang Masa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Alimul, A., & Hidayat. (2012). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*.
- Arikunto, Suharsimi. (2013) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipata
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014) *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafndo Persada. Bungin, Burhan. 2007
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Kencana Prenama Media Group.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edwards, S. (2009). *Best Practice Guide for Customer Service Professionals*
- Eko Putro Widoyoko. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Everett M, Rogers, (2016). *Diffution of Innovation*, third edition New York.

- Ghofur, A. (2018). Tindakan Sosial dalam Novel Yasmin Karya Diyana Milah. Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber).
- Hariwijaya. (2015). *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Parama Ilmu.
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit
- Idrus. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Eirlangga.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Kipjateng.jatengprov.go.id. (2019). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah*. <https://kipjateng.jatengprov.go.id/laporan/laporan-tahunan-kip-jateng/>
- Kipjateng.jatengprov.go.id, 2018. (2018). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah*. <https://kipjateng.jatengprov.go.id/laporan/laporan-tahunan-kip-jateng/>
- kominfo.jatimprov.go.id. (2020). *Ketua KI Pusat: Banyak BP yang Belum Laksanakan UU KIP*. Kominfo.Jatimprov.Go.Id. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ketua-ki-pusat-banyak-bp-yang-belum-laksanakan-uu-kip>
- komisiinformasi.go.id. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat*. https://komisiinformasi.go.id/pdf/20230306030343-Update%20Lap%202020323_1122.pdf
- Kristyanto, E. N. (2016). De Jure. In *Jurnal penelitian Hukum* (Vol. 16, Issue 740, pp. 231–244).
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- Marroli J. Indarto. (2012). Manajemen Komunikasi Pemerintah dalam Kebijakan Transparansi Informasi: Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. In *Fisip UI*.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nababan, S. (2019). *Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik*. 166–180.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. PT LKIS Pelangi Aksara.
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Ridwan, B. Y. & H. (2018). 1, 2 1,2. *Jurnal Komunikasi Pemikiran Dan Penelitian*, 04(01), 50–64.
- Riinawawti. (2021). *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*. PT. Pustaka Baru.
- Rohid, N., & Panuju, R. (2017). Manajemen Komunikasi Dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 3(2), 150. <https://doi.org/10.25124/liski.v3i2.1057>
- Setiana, A, S Harini, dan Sudarijati. 2018. Pengaruh Stres Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. HJG (Han UI Jaya Garment). Fakultas Ekonomi Djuanda Bogor
- Sriwartini, S. P. & Y. (2020). *No Title*. 5(9), 941–956.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2)*. Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.